

**Wajah Dunia Pendidikan :
Antara Ideologisasi dan Komersialisasi Pendidikan**

Ni Luh Putu Tejawati
Prodi Pendidikan Sejarah FPIPS IKIP PGRI Bali
tejawatiputu@gmail.com

Dewasa ini ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri. Fenomena inilah yang nampak jelas dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, di ranah praktis atau aksiologi pendidikan mengandung banyak makna (nilai) bahkan cenderung mengalami pergeseran nilai.

Tujuan dan manfaat dari penelitian Wajah Dunia Pendidikan: antara ideologisasi dan komersialisasi pendidikan memberikan manfaat masyarakat dapat mengkaji lebih dalam mengenai Hakekat pendidikan dan Komersialisasi pendidikan. Data dikumpulkan dengan metode observasi dan metode dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat terungkap beberapa hal dalam Wajah dunia pendidikan antara ideologisasi dan komersialisasi pendidikan, adanya pergeseran hakikat pendidikan sejalan dengan berjalannya waktu dan banyak masyarakat yang menjadi bagian dari komersialisasi pendidikan. Wajah dunia pendidikan : antara ideologisasi dan komersialisasi pendidikan dapat memberikan pengaruh pada bidang pendidikan sampai saat ini yang terus berubah secara dinamis.

Kata Kunci: Pendidikan, ideologi

Pendahuluan

Pendidikan Nasional yang sarat dengan pergumulan ideologi dan berbagai kepentingan telah terlempar jauh dari fungsi dan kakekat pendidikan yang sebenarnya. Tampaknya pendidikan tidak lagi dengan tulus ingin menuntaskan masalah kebodohan dan kemiskinan bagi bangsa ini, namun melakukan praktek kapitalisasi pendidikan yang sangat memberatkan masyarakat terutama dari kalangan tidak mampu. Sekarang ini, sekolah tidak hanya tempat mencari ilmu atau arena untuk memanusiakan manusia tetapi sekaligus juga sebagai ranah untuk mencari status sosial atau pencitraan diri yang merupakan representasi dari kelompok masyarakat tertentu yang diistilahkan dengan *the have*.

Dewasa ini ilmu bahkan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan

perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri. Atau secara filsafati dalam tahap penerapan konsep terdapat masalah moral ditinjau dari segi aksiologi keilmuan. Di tinjau dari sudut etimologi Aksiologi berasal dari perkataan *axios* yang berarti nilai dan *logos* berarti teori. Jadi aksiologi adalah teori tentang nilai. Lebih lanjut, Suriasumantri (1987: 234) mengatakan aksiologi adalah teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut kamus Bahasa Indonesia (1990: 19) aksiologi adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, kajian tentang nilai-nilai khususnya etika.

Fenomena inilah yang nampak jelas dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia, di ranah praktis atau aksiologi pendidikan mengandung

banyak makna (nilai) bahkan cenderung mengalami pergeseran nilai. Pendidikan atau pengetahuan menjadi komoditas tidak semata-mata terhenti pada nilai tukar (*exchange value*) dan nilai guna (*use value*) seperti dipahami oleh Marx, namun menurut Baudrillard sudah sampai ke nilai tanda (*sign value*). Obyek-obyek tersebut tidak memiliki makna karena kegunaan (nilai guna) tetapi mengandung nilai tanda (*sign value*), seperti : gaya ekspresi, prestise, kemewahan, dan kekuasaan (Ritzer, 2004 :136-145).

Untuk memahami bagaimana pergeseran nilai pendidikan pada ranah aksiologi maka perlu bagi kita mengkaji tentang konsep atau ideologi pendidikan, bagaimana makna pendidikan dilihat dari sudut ontologi.

Pembahasan

Hakekat pendidikan

Sebagai kebutuhan yang paling esensial bagi setiap manusia, pendidikan harus selalu ditumbuhkembangkan secara sistematis oleh para pengambil kebijakan. Transformasi dalam pendidikan selalu harus diupayakan agar pendidikan benar-benar dapat

memberikan kontribusi yang signifikan dalam usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Yunus, 2007: 103). Sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pendidikan merupakan upaya negara untuk mencerdaskan bangsa yang membawa pada taraf kesejahteraan dan kemajuan (Kartono, 1997: 82). Tujuan negara ini dipertegas kembali dalam Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Berdasarkan inilah maka pendidikan nasional dalam pasal 3 UU no 20 tahun 2003 berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berahlak mulia, Sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab.

Pendidikan bukan saja pilar terpenting dalam upaya mencerdaskan bangsa, tetapi juga syarat mutlak bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Dalam pendidikan terjadi proses pemanusiaan manusia secara manusiawi disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi sosialnya (Gunawan,2000: 47-48). Karena melalui sentuhan pendidikan proses pemanusiaan itu terjadi. Pada dasarnya manusia mempunyai potensi menjadi baik, seperti halnya juga memiliki kecenderungan tidak baik. Karena itu, diperlukan upaya untuk mewujudkan dan mengembangkan aspek kemanusiaannya pada tiap-tiap individu. Manusia sebagai makhluk ada memiliki ciri-ciri fisik dan sosial serta beberapa keinginan memerlukan pengembangan pribadi secara utuh. Hakekat manusia tidak hanya sebagai makhluk ada dan memiliki, tetapi juga makhluk menjadi (Fromm, 1987). Dalam artian, dia selalu ingin aktif guna menjadi sesuatu, mampu untuk memperoleh sesuatu untuk memenuhi hakikatnya sebagai makhluk memiliki (Atmadja, 1999). Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari bantuan orang lain. Manusia tidak dengan sendirinya

memanusia tetapi mereka memerlukan bantuan atau sentuhan pendidikan.

Melalui pendidikan, manusia dididik agar tahu dan mau bertindak sebagai manusia dan bukan hanya secara instingtif saja, sehingga pendidikan pada dasarnya merupakan proses homonisasi. Namun, pendidikan hendaknya dipahami pula sebagai humanisasi, yakni usaha agar seluruh sikap dan tindakan serta kegiatan mereka benar-benar bersifat manusia dan semakin manusiawi (Mardiatmadja,1990; 36). Dengan demikian, pendidikan sebagai pemanusiaan manusia muda mengarah pada dua sasaran, yakni homonisasi dan humanisasi. Pendidikan merupakan upaya sadar yang diarahkan untuk mencapai perbaikan di segala aspek kehidupan. Melalui pendidikan, anak akan menginternalisasikan sistem sosiokultural sehingga memberikan peluang bagi mereka untuk berkembang menjadi manusia yang utuh (Brouwer, 1982).

Berbicara tentang Hakekat pendidikan berarti kita mengupas sebuah ideologi, yakni suatu konsep yang tersistem secara rapi dalam sebuah teori. Ideologi oleh Arif

Rahman dalam bukunya yang berjudul "Politik Ideologi pendidikan" mempunyai dua pengertian, pengertian secara fungsional dan secara struktural. Secara fungsional, ideologi diartikan sebagai pemikiran yang digunakan untuk kebaikan bersama (common good). Dalam hal ini ideologi bisa muncul karena kekecewaan pada saat ini dan mempunyai niatan untuk memperbaiki di zaman akan datang. Sedangkan ideologi struktural, diartikan sebagai alat pembenar bagi kebijakan dan tindakan kaum penguasa, seolah-olah perbuatan sang penguasa itu semua benar dan wajib di ikuti. Ideologi pendidikan dalam perspektif filsafat ilmu diidentikkan sebagai bagian dari ranah Ontologis, yakni cabang ilmu yang menguak tentang objek apa yang di telaah oleh ilmu dan Bagaimana ujud yang hakiki dari objek tersebut. Atau menelaah bagaimana hakekat dan konsep pendidikan yang sebenarnya.

Masalah ideologi pendidikan ini dipertegas oleh William F O'neil yang menyatakan bahwa istilah ideology dan filosofi pendidikan memiliki kedekatan sama-sama merujuk pada satu aspek pembahasan, yaitu mengkaji pendidikan secara

fundamental melalui tingkatan abstraksi yang jauh lebih tinggi (2001, xxxi-xxxii).

Komersialisasi Pendidikan

Pendidikan Indonesia saat ini merupakan hasil dari kebijaksanaan politik pemerintah Indonesia selama ini. Mulai dari pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Pendidikan Indonesia masih mementingkan pendidikan yang bersifat dan berideologi materilisme-kapitalisme. Ideologi pendidikan yang demikian ini memang secara teoritis tidak nampak, akan tetapi secara praktis merupakan realitas yang tidak dapat dibantah lagi. Materialisasi atau proses menjadikan semua bernilai materi telah menyeruak di segala sendi sistem pendidikan Indonesia, dari tingkat kelompok bermain (play group, TK) sampai perguruan tinggi. Sendi-sendi yang dimasuki bukan hanya dalam materi pelajaran, pendidik, peserta didik, manajemen, lingkungan, akan tetapi juga tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan pendidikan telah mengarah ke hal-hal yang bersifat materi yang diukur dari skala pencapaian angka atau nilai agar

mampu bersaing di pasar global yang identik dengan dunia kapitalis. Saat ini pendidikan dengan menggunakan manajemen bisnis yang kemudian menghasilkan biaya yang melangit. Biaya pendidikan semakin mahal, bahkan telah menjadi komoditas bisnis bagi kaum pemilik modal (Mu'arif, 2008:106).

Pengemasan pendidikan dilakukan dalam berbagai bentuk dan cara, seperti sekolah unggulan, sekolah percontohan, sekolah internasional dengan dalih sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Komodifikasi ini terlihat jelas dalam pembentukan sekolah berlabel RSBI (rintisan sekolah bertaraf internasional) ataupun sekolah unggulan yang dimulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi standar Nasional Pendidikan (8 standar) dan diperkaya dengan standar pendidikan maju (PP No. 17 Tahun 2010). Sekolah bertaraf internasional merupakan sekolah nasional yang menyiapkan peserta didik berbasis Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia berkualitas internasional, dan lulusannya berdaya saing

Internasional. Jadi keberadaan sekolah berstatus RSBI atau SBI dimaksudkan untuk memberi layanan pendidikan secara berkualitas bagi masyarakat setara dengan negara-negara maju. Program RSBI memiliki visi mencetak siswa menjadi cerdas dan kompetitif yang meliputi : cerdas spiritual (olah pikir), cerdas emosional (olah rasa), cerdas intelektual (olah otak, dan cerdas fisik (olahraga).

Penyelenggaraan sekolah berstatus RSBI atau SBI diperkuat oleh UU No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional, UU No. 32/2004 (pemerintah daerah), PP no. 19/2005 (standar nasional pendidikan), PP no. 37/2007 (pembagian urusan pemerintahan antara provinsi dengan kabupaten), PP No. 48/2008 (pendanaan pendidikan), PP No. 17/2010 (pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan), Permendiknas No. 63/2009 (sistem penjaminan mutu pendidikan), dan Permendiknas No. 78/2009 (penyelenggaraan SBI pada jenjang pendidikan dasar dan menengah). Dasar hukum inilah yang mentasbihkan kedudukan sekolah yang berlabel SBI semakin kuat dan populer dalam masyarakat.

Sekolah standar RSBI atau SBI seolah-olah produk yang paling laku dijual dan mampu memberi keuntungan finansial di era sekarang, sehingga semua sekolah berlomba-lomba untuk mendapat gelar SBI. Sekolah "cap" atau dikemas RSBI dianggap begitu manjur untuk mengobati keterpurukan kualitas pendidikan di Indonesia dan sekaligus mampu memberikan status sosial eksklusif pada sekelompok masyarakat tertentu yang mampu secara ekonomi memberikan "sumbangan" kepada sekolah untuk menopang pelaksanaan RSBI ataupun SBI. Pendidikan pada tataran ini telah disulap menjadi ajang "bisnis intelektual" atau komersialisasi, maka visi dan orientasi sosialnya telah hilang, tenggelam bersama kepentingan bisnis yang hanya memandang antara dua pilihan, untung atau rugi (Mu'arif, 2008 :179).

Fenomena komersialisasi pendidikan juga nampak jelas dalam jual beli gelar tanpa memperdulikan mutunya. Saat ini seseorang semakin mudah mendapatkan gelar akademik tanpa perlu susah-susah belajar, yang penting ada duit gelar apapun bisa diraih. Karena itulah gelar akademik ini menjadi komoditas bisnis yang

menguntungkan bagi kaum kapitalis sehingga akan melahirkan kapitalisme pendidikan yang membuka jurang pemisah antara si kaya dan si miskin.

Pengemasan ini sesuai dengan ungkapan Karl Marx dan George Simmel yang menyatakan bahwa akibat ekonomi uang yang dilandasi oleh motivasi mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya mengakibatkan komodifikasi di berbagai kehidupan (Turner dan Weber, 1993). Konsep komoditas yang disampaikan oleh Marx pada prinsipnya merupakan upaya membedakan produksi antara masyarakat tradisional dan modern atau disini adalah membedakan antara masyarakat "mampu" dengan masyarakat yang "kurang mampu". Demikian pula dunia pendidikan di era sekarang yang sebagian besar dikelola berbasis kapitalis (komersialisasi pendidikan) akan melahirkan elitisme atau kelompok sosial yang mempunyai (*the have*) yang menempati status sosial istimewa di ranah sosial, dan memiliki jurang pemisah yang sangat dalam dengan kelompok masyarakat yang tidak mempunyai (*non the have*) yang secara status merupakan kelompok yang termarginal di

lingkungan mereka. Mengenai status, Weber (dikutip oleh Soekanto, 1993:249-250) menganggapnya sebagai hal yang menyangkut gaya hidup, kehormatan, dan hak-hak istimewa. Kalau kelas dikaitkan dengan produksi barang, maka gaya hidup berkaitan dengan konsumsi barang. Perbedaan status cenderung didasarkan pada harta benda dan gaya hidup memberikan pembatasan pada pola interaksi.

Kenyataan inilah yang menyebabkan tidak semua orang mampu menikmati fasilitas pendidikan seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 maupun UU Pendidikan Nasional, karena sistem pendidikan kita baru mampu memikirkan kelompok warga masyarakat yang relatif berkecukupan dari golongan pendapatan yang paling tinggi dan menengah serta masih sedikit menggarap kebutuhan edukatif kelompok-kelompok rakyat dari strata ekonomi lemah. Sampai saat ini masih terbukti pendidikan sama sekali belum bersemayam bagi masyarakat miskin padahal mendahulukan yang miskin merupakan nilai yang menentukan sebagai keputusan dalam setiap karya

pendidikan di Indonesia (Yunus, 2007 : 73).

Menurut Mangunwijaya (1999: 69), dalam bidang apapun kaum miskin merupakan kelompok masyarakat yang selalu kalah. Kelompok ini tidak punya *bargaining power* sama sekali, sehingga di manapun mereka berada selalu sebagai pecundang, baik dari sisi kekuasaan, harta, dan pendidikan. Bahkan, yang sering melekat pada kaum miskin adalah kehinaan, kepapaan, kemiskinan, pelacuran, dan kriminalitas. Semua itu, tidak bisa dihapus tetapi hanya dapat dicegah.

Sekolah bertaraf internasional atau unggulan dalam tataran praktis telah menutup akses masyarakat secara umum terhadap layanan pendidikan yang bermutu serta telah menciptakan kastanisasi sekolah menjadi beberapa kasta bahkan telah menciptakan kastanisasi sekolah. Kondisi ini akan menyebabkan kecemburuan sosial kaum miskin yang posisinya termaginal serta semakin mempertajam perbedaan dan pertentangan kelas (Mu'arif, 2008 : 178). Ideologi pendidikan dalam tataran praktis atau aksiologi telah dimanipulasi, pendidikan tidak lagi semata untuk

mencerdaskan masyarakat tetapi telah diversifikasi oleh makna atau nilai lainnya, yakni nilai sosial atau ajang pencitraan diri.

Masyarakat melalui lembaga pendidikan menciptakan dunianya sendiri yang dilengkapi dengan berbagai tanda atau kode untuk mempertegas keberadaanya yang berbeda dengan kelompok lainnya. Konsep ini sejalan dengan pemikiran Baudrillard yang menggambarkan masyarakat dewasa ini sebagai masyarakat simulasi yang hidup dengan silang-sengkarut kode, tanda, dan model yang diatur sebagai produksi dan reproduksi dalam sebuah *simulacra* (Lechte, 1994: 235). Simulacra adalah ruang dimana mekanisme simulasi berlangsung. Sejalan dengan perubahan struktur masyarakat simulasi, telah terjadi pergeseran nilai-tanda dalam masyarakat kontemporer dewasa ini yakni dari nilai-guna dan nilai-tukar ke nilai-tanda dan nilai-simbol.

Kini, menurut Baudrillard, adalah era kejayaan nilai-tanda dan nilai-simbol yang ditopang oleh meledaknya citra dan makna oleh media massa dan perkembangan teknologi. Sesuatu tidak lagi dinilai

berdasarkan manfaat atau harganya, melainkan berdasarkan prestise dan makna simbolisnya (Lechte, 1994: 234). Dengan hadirnya konsep komoditi, maka uang sebagai alat tukar pun semakin mendapat tempat penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat kapitalis. Lebih jauh, Marx menyatakan bahwa bila dalam era kapitalisme awal, uang hanyalah sarana tukar pemenuhan kebutuhan, maka dalam era kapitalisme lanjut, uang adalah tujuan akhir dengan komoditi sebagai sarannya (Kellner, 1994: 43). Dengan kata lain, nilai-tukar menjadi lebih penting dibanding nilai-guna. Komoditi diciptakan bukan untuk nilai-gunanya, melainkan demi nilai tukar yang berupa uang. Uang menjadi bahasa baru yang membentuk dan memberi makna realitas. Dengan uang misalnya, seseorang dapat membeli dan memiliki berbagai kualitas hidup manusia yang diinginkannya.

“Virus” ini juga melanda dunia pendidikan formal atau sekolah dimana lembaga pendidikan bukan lagi semata-mata sebagai tempat pencerdasan manusia tetapi sekaligus sebagai produsen berbagai status sosial. Pendidikan atau sekolah menjadi barang atau komoditi yang

sangat mahal sehingga tidak semua lapisan masyarakat dapat mencicipinya. Sekolah negeri atau milik pemerintah yang dahulunya sebagai tempat bernaung bagi si miskin memperoleh ilmu atau pendidikan sekarang telah bergeser aksiologinya. Sekolah negeri yang dilengkapi dengan beberapa label tidak mampu lagi memberikan pencerahan pada kaum terpinggir yang notabene adalah kelompok masyarakat yang kurang mampu di bidang ekonomi, relasi, maupun pengetahuan. Realitas ini tentu sangat bertentangan dengan Ayat 1 Pasal 5 UU Sisdiknas yang menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta Ayat 1 Pasal 111 tentang layanan pendidikan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi (UU No. 20 tahun 2003).

Kesimpulan

Dengan demikian ilmu atau pendidikan sudah berada di ambang kemajuan yang mempengaruhi reproduksi dan penciptaan manusia itu sendiri. Jadi ilmu bukan saja menimbulkan gejala dehumanisasi namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu

sendiri, atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun bahkan kemungkinan mengubah hakikat kemanusiaan itu sendiri, atau dengan perkataan lain, ilmu bukan lagi merupakan sarana yang membantu manusia mencapai tujuan hidupnya, namun juga menciptakan tujuan hidup itu sendiri.

Daftar pustaka

- Atmadja, N.B.1999. *Pendidikan sebagai homonisasi dan humanisasi dalam perspektif Agama Hindu*. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Aneka Widya. Singaraja: STKIP Singaraja.
- Baudrillard, J.P. 2004. *Masyarakat Konsumsi*. (Penerjemah Wahyunto). Yogyakarta. Kreasi Wacana.
- Brouwer, M.A.W. 1982. "Perubahan Kepribadian". Dalam M.A.W. Brouwer (ed). *Kepribadian dan Perubahannya*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Fromm, E. 1987. *Memiliki dan Menjadi tentang Dua Modus Eksistensi*. (Penerjemah F. Susilohardjo). Jakarta: LP3ES.
- Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi tentang Pelbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Kartono, Kartini. 1977. *Tinjauan Politik mengenai Sistem Pendidikan Nasional: Beberapa Kritik dan Sugesti*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Mangunwijaya, Y.B. 1999. *Saya Ingin Membayar Utang Kepada Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mardiatmadja, B.S. 1990. "Pendidikan dan Pendidikan Nilai". Dalam Dick Hartoko (ed), *Memanusiakkan Manusia Muda Tinjauan Pendidikan Humaniora*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mu'arif. 2008. *Liberalisasi Pendidikan : Menggadaikan Kecerdasan Kehidupan Bangsa*. Yogyakarta: Pinus Book Publisher.
- O'neill, William F. 2001. *Ideologi Ideologi Pendidikan*. (Penerjemah Omi Intan Naomi). Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suriasumantri, Jujun,S. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Ritzer, George. 2002. *Teori Sosial Postmodern*. (Penerjemah Muhammad Taufik). Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Yunus, Firdaus M. 2007. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial: Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka

